

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sesuai dengan Pasal 1, ayat (1) *Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, pengertian Badan Usaha Milik Negara dapat diartikan sebagai “sebuah badan atau organisasi yang memiliki usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung...”. Perusahaan BUMN memiliki beberapa tujuan utama yang dimuat berdasarkan *Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara* dalam pasal 2 ayat (1) yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Memberikan keuntungan bagi perekonomian nasional dan penerimaan negara
2. Menargetkan laba
3. Memberikan manfaat untuk masyarakat dengan menyediakan barang dan atau jasa agar dapat digunakan secara bersama-sama
4. Menjadi motivasi dan pelopor bagi masyarakat terhadap kegiatan yang belum pernah diaplikasikan pada tiap sektor koperasi maupun swasta
5. Aktif membimbing pengusaha golongan ekonomi menengah kebawah

Dalam UU tersebut, dijelaskan juga bahwa BUMN dibagi menjadi dua jenis diantaranya adalah Persero dan Perum. Dimana dalam Pasal 1, ayat (2) menyebutkan bahwa pengertian Persero ialah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki bentuk Perseroan Terbatas, dengan modal saham minimal 51% dimiliki Republik Indonesia dengan tujuan untuk mencari keuntungan/ laba. Sedangkan Perum atau Perusahaan Umum merupakan BUMN yang keseluruhan modalnya khusus untuk negara serta tidak membagi saham dengan tujuan untuk kemanfaatan umum (memproduksi barang/ jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 dalam pasal 1 yang membahas mengenai BUMN, Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk menyediakan barang-barang atau jasa dengan mutu yang tinggi yang pada akhirnya adalah untuk mengejar keuntungan. Salah satu caranya adalah dengan

meningkatkan nilai ekuitas menurut Panduan Go Public (Bursa Efek Indonesia, 2015), maka dikeluarkanlah IPO atau *Initial Public Offering*. Menurut (Mahrani & Soewarno, 2018) IPO adalah permulaan perusahaan untuk *Go Public* (memutuskan untuk melakukan transaksi jual-beli saham kepada masyarakat ke publik dengan media pasar modal). Berikut merupakan perusahaan BUMN yang telah *Go Public* di Bursa Efek Indonesia dan yang termasuk dalam beberapa sektor, yang digambarkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Perusahaan BUMN yang Terdaftar dalam BEI

No	Sektor	Nama Emiten	Kode Saham	Tahun IPO
1	Farmasi	PT Indofarma (Persero) Tbk.	INAF	17 April 2001
2		PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	KAEF	4 Juli 2001
3	Energi	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	PGAS	15 Desember 2003
4		PT. Elnusa Tbk	ELSA	6 Februari 2008
5	Manufaktur Baja	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	KRAS	10 November 2010
6	Konstruksi	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	ADHI	18 Maret 2004
7		PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	PTPP	9 Februari 2010
8		PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	WIKA	29 Oktober 2007
9		PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	WSKT	19 Desember 2012
10		PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	WEGE	30 November 2017
11		PT Waskita Beton Precast Tbk	WSBP	20 September 2016
12		PT Wijaya Karya Beton Tbk	WTON	8 April 2014
13		PT PP Presisi Tbk	PPRE	24 November 2017
14	Perbankan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	BBNI	25 November 1996
15		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	BBRI	10 November 2003
16		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	BBTN	17 Desember 2009
17		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	BMRI	14 Juli 2003
18		PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.	BRIS	9 Mei 2018
19	Pertambangan	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.	ANTM	27 November 1997
20		PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	PTBA	23 Desember 2002
21		PT Timah (Persero) Tbk.	TINS	19 Oktober 1995
22	Industri Semen	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	SMBR	28 Juni 2013
23		PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	SMGR	8 Juli 1991

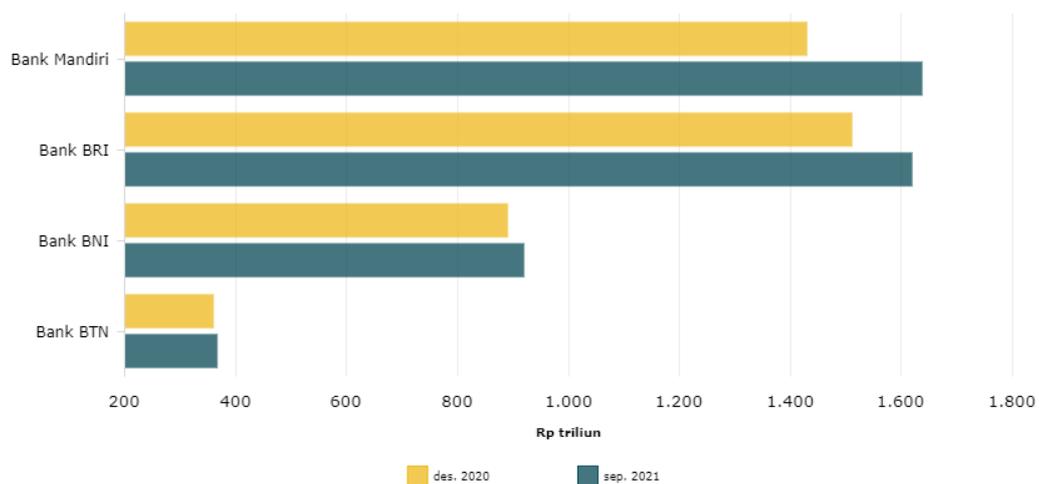
(bersambung)

(sambungan)

24	Sarana Prasarana	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	JSMR	12 November 2007
25		PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	GIAA	11 Februari 2011
26	Telekomunikasi	PT Telkom Indonesia Tbk.	TLKM	14 November 1995

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2020)

Berdasarkan data BEI, asset tertinggi terdapat di Bank Mandiri pada bulan September dengan pertumbuhan sebesar 14,56% menjadi Rp 1,64 kuadriliun yang disusul dengan Bank Rakyat Indonesia yang meningkat menjadi Rp 1,62 kuadriliun yang tumbuh 7,14% di kuartal III dalam 2021 ini dan seterusnya, Dengan melihat aset yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan tersebut, *Good Corporate Governance* yang diterapkan dari masing-masing perusahaan secara tidak langsung terlihat kualitasnya.



Gambar 1.1 Asset 4 Bank BUMN

Sumber: databoks.katadata.co.id, 2021

Laba yang dihasilkan dari Badan Usaha Milik Negara sangat berkaitan dengan kesuksesan pemerintahan dalam mengelola asset negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020) oleh karena itu peneliti berusaha melakukan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara GCG dengan kinerja keuangan pada perusahaan-perusahaan milik negara tersebut pada jangka waktu tertentu.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Berawal dari kinerja perusahaan, menurut Afandi (2021:83) Kinerja merupakan suatu hasil yang telah dicapai maupun tingkatan kesuksesan serta penilaian suatu individu sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan serta tanggung jawab yang diberikan untuk memenuhi target dengan cara memanfaatkan sumber yang telah ada tanpa melanggar hukum yang berlaku. Kinerja yang baik akan memberikan *output* peningkatan nilai suatu perusahaan dengan mengacu pada standar yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja digunakan untuk melihat dan memperbaiki tata kelola dari suatu perusahaan atau organisasi untuk mewujudkan tujuan utamanya (Febrianto, 2015).

Menurut Mahrani & Soewarno (2018) Hasil pengukuran pencapaian kinerja menjadi dasar bagi manajemen agar dapat meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang dan *scoring* digunakan sebagai dasar reward and punishment. Menurut Kusuma & Suryanawa (2021), alur *scoring* dalam pengukuran kinerja memuat penilaian mengenai kemajuan aktivitas terhadap target atau keberhasilan dari perusahaan maupun organisasi.

Diantara banyaknya cara mengetahui tingkat efisiensi kinerja perusahaan salah satunya adalah dengan melihat kinerja keuangannya. Kinerja keuangan menunjukkan keefektifan dan efisiensi suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Efektivitas mengacu pada kemampuan manajemen untuk memilih tujuan atau instrumen yang akurat sedangkan efisiensi mengacu pada rasio antara input dan output di mana input yang sesuai akan menghasilkan output yang optimal (Suhadak et al, 2018).

Telah banyak penelitian terdahulu yang melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan, beberapa diantaranya ada dari penelitian Agustiningsih (2016) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan investor untuk menilai baik buruknya perusahaan yang akan dimodalkan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mahrani (2018) memberikan pernyataan bahwa kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan beberapa diantaranya dapat dilihat melalui rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pura et al (2018), Rasio profitabilitas digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Dari penelitian Suhadak (2018) menyebutkan bahwa Efektivitas mengacu pada kemampuan manajemen untuk memilih tujuan atau instrumen yang akurat untuk mencapai tujuan tertentu. Efisiensi mengacu pada rasio antara input dan output di mana input yang sesuai akan menghasilkan output yang optimal. Peningkatan kinerja keuangan menjadi syarat bagi suatu perusahaan untuk menarik investor.

Cara untuk melihat kinerja keuangan dari perusahaan adalah dengan menganalisis laporan keuangan dengan rasio-rasio profitabilitas. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan adalah *Return On Assets*, ROA digunakan untuk acuan sebagai penentu baik buruknya pengembalian sebuah perusahaan. Untuk menghasilkan kinerja keuangan yang stabil maka diperlukan juga tata kelola perusahaan yang baik (Tata et al, 2021).

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis suatu perusahaan. Menurut Rustam (2017) tata kelola perusahaan merupakan sederet hubungan yang dirangkai antara dewan komisaris, direksi, dan pihak berkepentingan lainnya yang disusun sebagai sebuah struktur untuk menjalankan kegiatan yang membantu perusahaan untuk meningkatkan laba dan menjaga agar perusahaan beroperasi dengan aman dan nyaman tidak lupa juga menguntungkan konsumen. Kegiatan ini juga dilakukan dengan cara pengamanan asset serta peningkatan nilai investasi untuk para pemegang saham (untuk jangka waktu yang panjang). Selain itu, definisi *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi untuk mengarahkan dan juga melakukan pengendalian serta mengatur kegiatan bisnis perusahaan (*Organization for Economic Cooperation and Development*, 2019).

Dengan memanfaatkan *Good Corporate Governance*, perusahaan dapat memberikan nilai tambah yang berguna sebagai alat kompetitif agar menarik investor (Zahrawani et al, 2021). Jika dilihat dari *scorecard* atau skor tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan dan diunggah oleh *ASEAN Corporate*

Governance Association pada tahun 2020, setiap investor asing dan manajer dana eksternal akan dengan mudah mengambil keputusan investasi untuk jangka waktu yang panjang.

Tabel 1.2 Skor Tata Kelola Perusahaan ASEAN

Market Rankings & Scores			
No	Pasar	Total (%)	Highlight Pasar Makro
1	Australia	74.7	Komisi perbankan memacu penegakan, masih belum ada Komisi Independen Pemberantas Korupsi
2	Hongkong	63.5	Regulator audit baru, penegakan tetap kuat, Komisi Independen Pemberantas Korupsi mengecewakan
3	Singapura	63.2	Penegakan aturan dengan lebih baik, pengungkapan perusahaan mengecewakan
4	Taiwan	62.2	Reformasi Corporate Governance besar mendorong maju berbagai bidang usaha, aturan masih rumit
5	Malaysia	59.5	Gejolak politik mengikis skor pemerintah, daerah lain tetap stabil
6	Jepang	59.3	Di depan dalam pelaporan perubahan iklim, tertinggal dalam pengungkapan Corporate Governance perusahaan
7	India	58.2	Audit regulasi baru, peningkatan masyarakat sipil, tata kelola public mengecewakan

(bersambung)

(sambungan)

8	Thailand	56.6	Gejolak politik mengikis skor pemerintah, aturan kuat, investor membaik
10	Cina	43.0	Menempa jalur tata kelolanya sendiri, masih menunggu pelaporan pedoman Environmental, Social, and Governance
11	Filipina	39.0	Fokus regulasi yang lebih kuat pada pemerintah pusat, investor, dan masyarakat sipil mengecewakan
12	Indonesia	33.6	Reformasi CG terus berjuang, beberapa aturan yang lebih kuat, system baru e-voting

Sumber : www.acga-asia.org, 2020

Dilihat dari Tabel 1.2 yang diunggah oleh *Asian Corporate Governance Association* atau ACGA (2020) menyatakan bahwa skor keseluruhan pasar bukan rata-rata dari skor persentase kategori. Melainkan merupakan agregat dari semua poin yang diterima untuk 119 pertanyaan dalam survei ACGA, yang pada akhirnya dilakukan konversi ke persentase dan dibulatkan. Jika dilihat dari Tabel 1.2 Indonesia masih berada di tingkatan terakhir yang berarti kegiatan GCG yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara lainnya.

Pada mulanya, Indonesia diperkenalkan dengan GCG di tahun 1997, dimana tahun tersebut terjadi fenomena krisis moneter. Krisis ini ternyata berkepanjangan dan dinilai fatal karena tidak ada atau tidak berjalannya *corporate governance* yang baik serta diikuti dengan pengabaian regulasi dengan adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang pada akhirnya di Indonesia mulai ditetapkan peraturan mengenai GCG untuk perusahaan pada 1998 dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengatur mengenai Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN.

Kemudian diikuti dengan Komite Nasional Kebijakan Governance yang pada tahun 2006 dengan melakukan penyempurnaan pedoman (Karunia, 2021). Terbukti bahwa setelah GCG diterapkan, perusahaan telah diselamatkan dengan ditunjukannya peningkatan penilaian pasar untuk setiap tahun. Namun terkait hal ini, skor Indonesia sendiri hingga kini masih tidak lebih tinggi dari negara lainnya. Alasan utama terjadinya hal ini disebabkan oleh oknum dalam perusahaan-perusahaan yang sering kedapatan melanggar GCG.

Pada tahun 2016 terdapat suatu manajemen sistem yang muncul dengan nama ISO 37001:2016 yang menerapkan manajemen anti penyuapan dan persyaratan yang tujuannya adalah untuk membantu organisasi atau perusahaan dalam membenahi kegiatan pelanggaran GCG, kegiatan pelanggaran ini masih terjadi setelah tahun tersebut. Hal inilah yang menjadi bukti rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnya memenuhi aspek GCG yang hingga akhirnya kasus-kasus pelanggaran GCG ini membesar kepada kasus korupsi dan tindakan lain. Contohnya dalam beberapa kasus kecurangan GCG yang telah dirasakan perusahaan di Indonesia diantaranya adalah kasus dari Kimia Farma yang pada tahun 2001 melakukan pelanggaran GCG. Menurut manajemen dari perusahaan tersebut dilaporkan bahwa laba bersih yang dihasilkan oleh KAEF yang di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa adalah sebesar Rp 132 miliar. Namun Kementerian BUMN pada saat itu tidak langsung mempercayai karena laba yang begitu besar. Akhirnya setelah penyelidikan dibuktikan bahwa terdapat unsur rekayasa atau manipulasi laporan keuangan. Dalam kasus ini akuntan melanggar etika profesinya dalam mewujudkan prinsip GCG (Hidayat, 2015)

Selanjutnya terdapat kasus dari PT. Waskita Karya dimana pada Tahun 2009-2015 telah melakukan tindak pidana korupsi dengan kasus melakukan pekerjaan proyek-proyek fiktif dengan kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar Rp 202 miliar, padahal PT. Waskita Karya telah melakukan pemetaan implementasi GCG secara berkala namun kasus ini tidak terlacak sekian lamanya karena diduga hasil pemetaan tersebut hanya menjadi formalitas kewajiban penerapan GCG saja dalam perusahaan tersebut dan kerjasama pihak internal dalam melakukan kecurangan, arti kata lain *internal control* dalam perusahaan lemah (Ramadhan,

2020), Selain itu juga di sektor sarana dan prasarana juga terdapat 2 kasus, untuk kasus pertama yaitu kasus suap dari PT. Jasa Marga yang bernilai Rp 115 juta dari *General Manager* perusahaan tersebut terhadap salah satu auditor BPK di tahun 2017 dengan penyelesaian, pihak JSMR sendiri telah membentuk tim khusus yang dinaungi oleh direktur utama yang berfokus terhadap GCG baik JSMR pusat pun cabang (Putri, 2017).

Dari PT. Garuda Indonesia (GIAA) yang membuat kepercayaan publik menurun, dimana pada saat itu terdapat kecurangan dalam pencatatan laporan keuangan yaitu ada dua komisioner yang tidak mau menandatangani laporan keuangan karena merasa keberatan dengan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan yang dilakukan terhadap PT. Mahata Aero Teknologi dan PT. Citilink Indonesia yang kurang tepat dalam mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 23 yang dalam berita yang dilansir oleh Sugianto (2019) menyatakan bahwa manajemen GIAA menemukan bahwa uang yang menjadi pendapatan dari PT. Mahata sebagian masih dalam bentuk piutang. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh komite audit pun belum sepenuhnya mengikuti PSAK yang berarti belum sesuai dengan standar yang berlaku (terdapat kejanggalan). Pada Tahun 2019 PT. Krakatau Steel Tbk melakukan perubahan signifikan terhadap tatanan perusahaannya. sangat cemerlang bagi KRAS untuk melakukan pembenahan GCG guna mendorong tingkat kebersihan dan kesehatan BUMN. tiap-tiap anggota melakukan usaha pencegahan KKN untuk menjunjung integrasi perusahaan. Manajemen pada tahun tersebut bekerjasama dengan BPKP untuk menyelaraskan *assessment* GCG dan menyelesaikan temuan BPK dengan *roadmap* untuk tahun berikutnya adalah *optimizing* infrastruktur GCG secara konsisten (Candra, 2019)

Dari banyaknya kasus, peneliti mendapati bahwa pelanggaran yang terjadi sebagian dilakukan oleh sumber daya manusia yang terdapat dan berwenang di perusahaan-perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara, yang menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara yang dijelaskan pada bagian kedua pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “BUMN diwajibkan untuk menerapkan GCG secara baik dan konsisten serta berkelanjutan dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri dengan tetap pada aturannya, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.” Yang berarti, masih banyak perusahaan BUMN yang tidak menerapkan peraturan dengan baik dan mempengaruhi kesehatan perusahaan yang pastinya akan berpengaruh pada bagian kinerja perusahaan terlebih dalam bagian keuangannya. Maka dari itu penelitian yang dilakukan ini akan berfokus terhadap perusahaan yang termasuk ke dalam BUMN.

Pada penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2016 mengenai pengaruh dari diterapkannya *corporate governance* akan kinerja keuangan pada perusahaan di Indonesia yang ditulis oleh Agustiningsih et al (2016), menghasilkan *output* ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan dan tingkat independensi dewan komisaris juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja dari sisi keuangan dalam perusahaan yang diteliti. Lalu selanjutnya yaitu penelitian Situmorang & Simanjuntak (2019) yang juga melakukan penelitian mengenai pengaruh dari GCG terhadap kinerja keuangan dari perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa hasil dari penelitian tersebut menunjukkan presentase GCG secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negative terhadap kinerja keuangan perbankan, secara simultan penelitian ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dengan arah koefisien positif.

Dari hasil penelitian tersebut, membuktikan bahwa pernyataan dari Suryanto & Refianto (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan GCG (seperti adanya kepemilikan manajerial, komite audit, dewan komisaris independen) berpengaruh positif maupun negative terhadap kinerja keuangan perusahaan atau dalam arti kata lain *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustiningsih et al (2016) dan juga Situmorang & Simanjuntak (2019) dilakukan dengan melihat variabel-variabel GCG terhadap kinerja keuangan menggunakan *Cash Flow Return On Assets* dan *Return on Equity*. Namun Mahrani & Soewarno (2018) pada saat melakukan penelitian merasa bahwa *Return on Asset* adalah rasio yang seharusnya digunakan untuk mewakili kinerja keuangan.

Menurut penelitian Suhadak et al, (2018) yang berperan sebagai sebagai variabel dalam GCG beberapa diantaranya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan ukuran komite audit yang didasari oleh lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Berdasarkan penjelasan dari Karunia (2021) untuk komisaris independen sendiri merupakan perwakilan yang ditetapkan sebagai pengawas dan penanggungjawab pemegang saham minoritas (*independent*) seperti pada prinsip GCG yaitu *independency* yang membebaskan konflik kepentingan dan bersifat netral dengan misi mendorong kesetaraan atau *fairness*. Pemilihan penggunaan proksi komisaris independen dibandingkan dewan komisaris dikarenakan tugas dari kedua dewan ini sama dan peneliti lebih menempatkan faktor independensi terhadap komisaris independent.

Berhubungan dengan penetapan komite audit yang juga bekerja secara independen untuk menjalankan fungsi pengawasan agar tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dan meningkatkan penilaian secara objektif terhadap dewan komisaris (Pura et al., 2018). Selanjutnya untuk kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dapat juga dikatakan sebagai alat *monitoring* yang efektif untuk mengawasi investasi manajerial dan institusional terhadap perusahaan yang juga berpengaruh terhadap tata kelola perusahaan.

Return on Assets peneliti gunakan sebagai Variabel Y dengan tujuan untuk memberikan ukuran atau rasio yang lebih baik terhadap kinerja keuangan perusahaan, sebab ROA memiliki manfaat sebagai tolak ukur yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mendayagunakan asetnya untuk menghasilkan laba dan juga ROA focus dalam menganalisis informasi kinerja suatu perusahaan secara keseluruhan. Selain itu ROA merupakan suatu skala yang penting untuk diamati (Kasmir, 2016) yang berkaitan terhadap guna dari GCG sendiri yaitu untuk memastikan aktiva perusahaan untuk diolah dan dijaga dengan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan laba karena ROA dapat mengkalkulasikan pengembalian asset yang koheren (Tiong, 2017). Dengan menggunakan rasio ini akan membuat penelitian lebih komprehensif dikarenakan ROA akan menghasilkan pengukuran tingkat efektifitas keseluruhan operasi.

Jika dibandingkan dengan *Return On Equity*, dalam beberapa kasus khususnya perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki nilai hutang yang besar seperti PT. Waskita Karya yang di akhir tahun 2019 memiliki hutang hingga Rp 90 miliar maupun PT. Garuda Indonesia dengan hutangnya hingga 9,8 miliar Dollar AS (Idris, 2021) belum bisa menjadikan ROE sebagai patokan kinerja keuangan, dikarenakan ROE dianggap kurang tepat karena ROE tidak akan melibatkan perusahaan-perusahaan dengan hutang besar terhadap perhitungan analisis investasinya (Tsvetanov, 2017).

Dari penelitian-penelitian yang dijadikan sebagai acuan, terdapat beberapa penelitian yang berbeda dalam pemakaian kinerja keuangannya. Diantaranya adalah penelitian dari Agustiniingsih (2016) mengaitkan antara kinerja keuangan perusahaan dengan Good Corporate Governance memakai CFROA (Cash Flow Return On Assets) dengan alasan CFROA dianggap lebih relevan dan mampu merefleksikan keadaan yang sebenarnya dari kinerja keuangan perusahaan dan juga ROE. Untuk penelitian berikutnya oleh Simanjuntak et al (2019) rasio yang mewakili kinerja keuangan yang uji adalah ROE. Lalu pada penelitian berikutnya oleh Indriastuti et al (2021) yang menggunakan NPM atau Net Profit Margin.

Untuk penelitian yang dilakukan oleh Mahrani (2018) yang melakukan penelitian mengenai *financial performance* dengan ratio ROA menggunakan manajemen laba sebagai variabel mediasi untuk melihat dampak dari diterapkannya Good Corporate Governance terhadap perusahaan-perusahaan. Penelitian oleh Handayani et al (2018), Pura et al (2018), Novitasari (2020), dan Deswara et al (2021) juga menggunakan rasio Return On Assets dengan alasan ROA sebagai rasio kinerja keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi keuntungan mengukur kekuatan perusahaan membuahakan keuntungan atau juga laba pada tingkat pendapatan tepat digunakan sebagai pengukuran perusahaan perbankan.

Dengan dilakukannya evaluasi mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI, peneliti berharap dapat menyajikan informasi mengenai implementasi *Good Corporate Governance* (dengan alasan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan pertanggungjawaban manajemen) untuk menunjukkan penguasaan dari perusahaan

BUMN di banyak sektor dalam melakukan stabilisasi, mengolah, dan mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya sehingga tumbuh proses pengambilan keputusan yang baik, dan mampu menambah kepercayaan dari stakeholder dan investor untuk tetap bertahan pada perusahaan dengan menguji kembali pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan ukuran komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka peneliti mengambil judul “**Analisis *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN *Go Public* Periode 2016-2020**”

1.3 Perumusan Masalah

Good Corporate Governance selalu menjadi sorotan utama jika terjadi kasus dalam perusahaan besar, dikarenakan sudah seharusnya perusahaan memiliki regulasi dalam mengendalikan GCG dengan aturan atas tujuan untuk menguntungkan pemegang saham dan pemangku kepentingan. GCG memiliki peran untuk mendorong perusahaan dalam meningkatkan nilai dari perusahaan agar lebih optimal. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Apakah GCG (Kepemilikan Institusional) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN *Go Public* periode 2016-2020?
2. Apakah GCG (Kepemilikan Manajerial) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN *Go Public* periode 2016-2020?
3. Apakah GCG (Dewan Komisaris Independent) berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan BUMN *Go Public* periode 2016-2020?
4. Apakah GCG (Ukuran Komite Audit) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN *Go Public* periode 2016-2020?
5. Apakah terdapat pengaruh signifikan mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independent, dan Ukuran Komite Audit) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN *Go Public* periode 2016-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh GCG (Kepemilikan Institusional) terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN *Go Public* periode 2016-2020
2. Pengaruh GCG (Kepemilikan Manajerial) terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN *Go Public* periode 2016-2020
3. Pengaruh GCG (Dewan Komisaris Independent) terhadap kinerja perusahaan BUMN *Go Public* periode 2016-2020
4. Pengaruh GCG (Ukuran Komite Audit) terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN *Go Public* periode 2016-2020
5. Pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independent, dan Ukuran Komite Audit) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN *Go Public* periode 2016-2020

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca, peneliti menemukan manfaat dari beberapa aspek diantaranya adalah aspek akademis dan aspek praktis.

1.5.1 Aspek Akademis

Manfaat dari penelitian ini jika dilihat dari aspek akademis (pengembangan ilmu pengetahuan) adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan mengenai *Good Corporate Governance* dan betapa pentingnya GCG bagi sebuah perusahaan, mengenal struktur Corporate Governance, dan mengetahui penyebaran asset dari perusahaan.
2. Manfaat bagi akademis adalah dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi terhadap GCG perusahaan di kemudian hari

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat dari penelitian ini jika dilihat dari aspek praktis (aspek yang digunakan untuk tujuan manfaat kepada pihak eksternal) adalah bagi pihak perusahaan BUMN yang diteliti memungkinkan untuk menjadi rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Dan juga dengan adanya penelitian ini perusahaan terkait juga dapat melakukan *upgrading* terhadap aspek-aspek terkait.

1.6 Sistematika Penelitian Tugas Akhir

Sistematika penelitian merupakan gambaran secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini sistematika penelitian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian Tugas Akhir.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dari penelitian GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN

dalam periode tertentu dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.